



Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa

Sotya Partiwi Ediwijoyo^{1*}, Wakhid Yuliyanto², Ari Waluyo³

¹²Akuntansi, Politeknik Dharma Patria Kebumen, Indonesia, 543611

³Teknik Elektronika, Politeknik Dharma Patria Kebumen, Indonesia, 543611

E-mail: wien.sotya@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i3.412>

Info Artikel:

Diterima :

17-12-2020

Diperbaiki :

21-12-2020

Disetujui :

21-12-2020

Abstrak: Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan tentang tata kelola administrasi Desa merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi dan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas pada perangkat desa Pemdes Padureso khususnya pada bidang tata kelola administrasi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan dengan teknik dialog atau curah pendapat. Dengan kegiatan ini maka meningkatnya kinerja dan kemampuan administrasi tenaga/perangkat desa serta para pengelola BUMDES yang ada di Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, sehingga akan mengubah cara kerja tradisional menjadi cara kerja profesional untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Public, Sosialisasi, Administrasi Desa

Abstract: Socialization and outreach activities on village administration governance are part of community service activities. The purpose of this outreach and counseling is to improve the capacity or quality of the Padureso village government apparatus, especially in the area of administrative governance. The method used is socialization and counseling with dialogue techniques or brainstorming. With this activity, the increase in the performance and administrative capacity of village personnel / apparatus as well as BUMDES managers in

Keywords : *Public Services, Socialization, Village Administration*

Padureso Village, Padureso District, Kebumen Regency, so that it will change the traditional way of working into a professional way of working to improve community services.

Pendahuluan

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa atau kerap disebut PEMDES adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa dan perangkatnya sebagai pelaksana pemerintahan desa untuk dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi, terutama perangkat desa yang berada langsung dibawah Kepala Desa.

Perangkat desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan layanan kebutuhan masyarakat yang prosesnya harus melalui administrasi desa. Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena mengelola jalannya administrasi pemerintahan desa, sehingga dapat dikatakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa, kemampuan pengelolaan administrasi sangatlah penting dimiliki oleh perangkat desa.

Untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah menetapkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang membahas administrasi yang ada di Desa. Adapun Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa. Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Menurut Syafie (2015), bahwa batasan tadi termasuk dalam pengertian administrasi secara sempit. Karena aktivitas administrasi hanya terbatas pada catat mencatat data dan informasi yang dilakukan di kantor desa.

Desa Padureso terletak di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa ini sekaligus merupakan ibu kota kecamatan Padureso yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Di Desa ini terdapat gerbang utama untuk masuk ke objek wisata Waduk Wadaslintang (Wikipedia.org). Permasalahan yang bisa diidentifikasi di Pemerintah Desa Padureso ini antara lain: para penyelenggara pemerintahan di desa belum menjadikan pengelolaan administrasi sebagai faktor penting dalam pelayanan publik. Lembaga pengabdian masyarakat dari Politeknik Dharma Patria berupaya mendukung program pemerintah tersebut dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kesadaran perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas pada perangkat desa Pemdes Padureso khususnya pada bidang tata kelola administrasi.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparat desa mengenai pentingnya Administrasi Pemerintahan Desa yang menangani keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Tata kelola administrasi desa yang baik diharapkan memberikan perubahan yang fundamental terhadap kegiatan pelayanan masyarakat pedesaan. Administrasi pemerintahan desa harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat akan makin puas dan dapat diperkecil serta dipersempit jaraknya (Toha, 2008). Tata kelola administrasi desa kedengarannya sederhana tapi ini berperan penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang ada di desa. Tata kelola administrasi desa yang baik dan benar akan menjadi faktor penunjang pembangunan desa terhadap kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat.

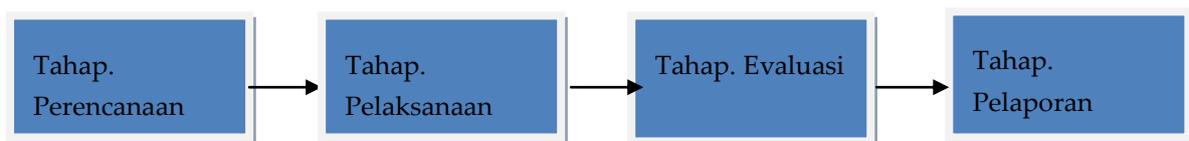
Metode

Metode pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahapan persiapan dengan memulai koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya yaitu tahapan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah 16 peserta yang merupakan perangkat desa Pemerintah Desa Padureso dan pengelola BUMDES Padureso. Adapun metode yang digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan.

Sosialisasi merupakan sebuah proses dimana manusia belajar berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara bertindak, berpikir, dan merasakan, semua hal tersebut merupakan bagian penting untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif dalam kelompok masyarakat. Menurut Zanden (1990), sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Dengan metode sosialisasi ini, dapat memudahkan dalam memberikan gambaran tentang seluk beluk administrasi dan kaitannya dengan pelayanan publik.

Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku yang berkelanjutan, dimana perubahan yang dituntut tidak semata-mata karena penambahan pengetahuan saja, namun diharapkan juga adanya perubahan pada keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik, produktif, dan menguntungkan (Lucie 2005). Penyuluhan berperan sebagai salah satu metode penambahan dan peningkatan motivasi seseorang sebagai tahap awal terjadinya perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku akan menyangkut aspek motivasi, keterampilan dan sikap mental, sehingga mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarga yang ingin dicapai. Penyuluhan disampaikan dalam bentuk dialog interaktif atau curah pendapat adalah suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta, dan evaluasi atas pendapat-pendapat tadi dilakukan kemudian.

Adapun alur kegiatan PKM sebagai berikut :



Gambar 1 Alur Kegiatan

- Tahap 1. Perencanaan

Pada tahap ini, solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan untuk membuka wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting pengelolaan administrasi bagi peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan dan berkordinasi untuk mengadakan modul dan alat presentasi.

- Tahap 2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, melakukan sosialisasi dan penyuluhan.

Kegiatan ini dengan cara memaparkan materi mengenai pengantar administrasi perkantoran dan tata kelola administrasi, tujuannya adalah merubah cara kerja dari cara tradisional menjadi cara kerja profesional, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Setelah pemaparan selesai maka dilanjutkan dengan dialog interaktif atau curah pendapat.

- Tahap 3. Evaluasi

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dari hasil sosialisasi dan penyuluhan.

- Tahap 4. Penyusunan Laporan Kegiatan

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dari hasil sosialisasi dan penyuluhan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tata kelola admisnistrasi pemerintahan desa sebagai peningkatan kemampuan diri para perangkat Desa dan pengelola BUMDES di Desa Padureso ini dilaksanakan pada tanggal Nopember 2020 dengan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Pembukaan oleh Kepala Desa Padureso
2. Pemaparan materi tata kelola admisnistrasi pemerintahan desa oleh Dra. Sotya Partiwijoyo, M.M sebagai nara sumber.
3. Dialog interaktif atau curah pendapat dipandu oleh Wakhid Yuliyanto, S.E., M.M

Pelaksanaan kegiatan pelatihan diawali dengan pemaparan materi pengenalan tata kelola admisnistrasi desa, setelah itu dilakukan dialog curah pendapat untuk mengetahui hambatan dan kendala yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi di kantor pemerintahan desa Padureso.

Pelaksanaan Kegiatan ini diakhiri dengan penutupan oleh Kepala Desa Padureso. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan administrasi tenaga/perangkat desa serta para pengelola BUMDES yang ada di Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, dengan mengubah cara kerja tradisional menjadi cara kerja profesional untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.



Gambar 2 Paparan Materi

Materi sosialisasi tata kelola administrasi pemerintahan desa mengacu pada Permendagri No.47 tahun 2016, yakni:

- a) tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa;
- b) pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c) penyesuaian kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Adapun ruang lingkup Administrasi Desa yang dikelola adalah:

1. **Administrasi Umum:**

Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

Buku Administrasi Umum ini merupakan register dari:

Buku Peraturan Di Desa; Buku Keputusan Kepala Desa; Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; Buku Aparat Pemerintah Desa; Buku Tanah Kas Desa; Buku Tanah di Desa; Buku Agenda; Buku Ekspedisi; Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

2. Administrasi Penduduk:

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.

Buku Administrasi Penduduk ini terdiri dari register:

Buku Induk Penduduk; Buku Mutasi Penduduk Desa; Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; Buku Penduduk Sementara; Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

3. Administrasi Keuangan:

Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.

Buku Administrasi Keuangan ini terdiri dari register:

Buku APB Desa; Buku Rencana Anggaran Biaya; Buku Kas Pembantu Kegiatan; Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu; dan Buku Bank Desa.

4. Administrasi Pembangunan:

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan,

Buku Administrasi Pembangunan ini terdiri dari register:

Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa; Buku Kegiatan Pembangunan; Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Administrasi Lainnya:

Buku ini terdiri dari register sebagai berikut:

Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa; Kegiatan musyawarah Desa; Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.



Gambar 3 Paparan Materi

Kegiatan pengabdian ini terkait dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa serta pengurus BUMDES. Dengan harapan agar pengelolaan administrasi pemerintahan desa dapat berlangsung dengan tertib dan teratur dalam melayani kebutuhan masyarakat disatu pihak dan kebutuhan pemerintah atas data dan informasi dipihak lain.

Hasil capaian kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ini dapat dikatakan cukup berhasil. Partisipasi aktif peserta dalam sosialisasi dan dialog curah pendapat menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola administrasi desa. Dengan adanya kegiatan ini juga mengubah cara pandang dalam pengelolaan adminstrasi dari yang bersifat tradisional menjadi profesional dan melihat pentingnya pemahaman tata kelola administrasi dalam peningkatan pelayanan publik.



Gambar 4

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal Nopember 2020 hari Kamis menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tata kelola admisnistrasi desa di pemerintah Desa Padureso ini dirasa sangat bermanfaat bagi setiap perangkat desa dan pengurus BUMDES di Desa Padureso dengan melihat antusiasme setiap peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tata kelola admisnistrasi desa tersebut. Adapun kesimpulan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Admisnistrasi Desa dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Desa Padureso
2. Setiap modul dan tahapan pengelolaan admisnistrasi desa dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap peserta.
3. Terjadinya peningkatan kinerja dan kemampuan administrasi tenaga/perangkat desa serta para pengelola BUMDES yang ada di Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, karena perubahan cara kerja tradisional menjadi cara kerja profesional untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kepada Direktur Politeknik Dharma Patria Kebumen yang telah memberi kesempatan dan memberi ijin kepada Dosenya untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Kepala Desa Padureso Bapak Teguh Sukarman yang mempercayakan pelatihan dan narasumber dari dosen Politeknik Dharma Patria Pihak-pihak yang membantu kelancaran terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Lucie, S. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Edisi Pertama Cetakan Ke-2. Kencana. Jakarta.

- Zanden, Vander. 1990. *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Achmad Daniri, 2005. *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*. Jakarta. Ray Indonesia
- Ali Mufiz, 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro, et.al, 2014. *Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*,
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.